

SKRIPSI

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
PADA PT. PERINTIS PRIBADI USAHA PRIMA
PEKANBARU**



OLEH:

EPA PUTRI YANI
10973005741

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2013**

ABSTRAK

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT PRINTIS PRIBADI USAHA PRIMA PEKANBARU

**OLEH:
EPA PUTRI YANI
10973005741**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan pada PT. Printis Pribadi Usaha Prima Pekanbaru apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Dari analisis data yang dilakukan oleh penulis atas masalah yang ditemukan dalam penelitian ini, diperoleh hasil bahwa perusahaan mencatat jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Yaitu berupa data pembukuan dan catatan-catatan akuntansi seperti perhitungan laba rugi, neraca, daftar penyusutan aktiva tetap serta data yang berhubungan dengan perpajakan yaitu SPT PPh Badan Tahunan 2011.

Hasil penelitian menemukan bahwa ada pendapatan dan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan (UU No.36 Tahun 2008) antara lain: pendapatan jasa giro, biaya entertainment, biaya sumbangan, biaya astek beban penyusutan dan PPh Pasal 29.

Kata kunci: Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT karena dengan karunia-Nya dan kemudahan dari-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri. Walaupun tidak sedikit ringan dan hambatan yang penulis rasakan dari penyusunan hingga selesainya skripsi ini dengan judul : **“ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. PRINTIS PRIBADI USAHA PRIMA PEKANBARU”**.

Dalam proses penyusunan skripsi ini banyak dorongan dan dukungan dari berbagai pihak yang penulis terima. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir sebagai rektor Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau
2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau
3. Bapak Dony Martias, SE, MM, selaku ketua jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau
4. Ibu Hesty Wulandari, SE, M. Sc, Ak selaku Dosen konsultasi Proposal yang telah mengarahkan penulis selama penulisan proposal
5. Bapak Alchudri, SE, Ak, MM, CPA selaku pembimbing skripsi yang telah mengorbankan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, saran dan arahan serta nasehat agar penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
6. Ibu Renewatie Setiawan selaku Direktur Utama pada PT. Printis Pribadi Usaha Prima Pekanbaru yang membantu penulis selama melakukan penelitian
7. *Special Thanks For* Ayahanda Idris dan Ibunda Rotina yang selalu mendoakan penulis dan memberi dukungan. Terimakasih untuk semua Pengorbanan, Kesabaran, Nasehat, Do'a, Cinta dan Kasih Sayang yang

tiada henti yang ayah dan ibu berikan kepada penulis sehingga dapat menghantarkan peneliti pada cita-cita yang diinginkan. Tiada balasan setimpal apa pun yang dapat penulis berikan kecuali istiqomah tetap selalu berdo'a untuk ayah dan ibu semoga selalu berada dalam Naungan Ridho Allah SWT.

8. Adik ku tercinta Afri Naldi dan Esas Mita Rosadi yang memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga bisa menjadi contoh yang baik untuk mereka dan semoga apa yang kita cita-citakan tercapai, dan selalu berbakti kepada orang tua.
9. Buat motivator ku, yang selalu memberikan suport dan nasehat Mayu Hendri, terimakasih sudah sabar dan sudah setia membantu penulisan skripsi, menemani hari-hari penulis kesana kisini dalam menyelesaikan skripsi dan sudah mau menempatkan sebagai apapun buat penulis.
10. Buat teman-teman dan adik-adik kos yang telah memberikan semangat dan dorongan motivasi bagi penulis semoga kita menjadi orang yang sukses berguna bagi nusa dan bangsa.
11. Buat temanku Ulfat, Sartika, Muhti Indra, Nuriati, Ita, Fitri ,Asih, Sali, Siti dan teman seperjuangan lain yang tidak penulis sebutkan satu persatu terima kasih untuk persahabatan yang indah selama menjalani perkuliahan dan teman di jurusan Akuntansi B'09 dan teman KKN Tuty dan Yuli.
12. Seluruh keluarga besar dan semua pihak yang tidak mungkin di sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, amin.

Pekanbaru, Oktober 2013

Penulis

EPA PUTRI YANI

DAFTAR ISI

ABSRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Pengerian Akuntansi.....	12
B. Pengertian Pendapatan.....	13
C. Pengertian Beban.....	13
D. Pengertian Pajak	14
E. Pengertian Subjek Pajak dan Objek Pajak.....	16
F. Tarif Pajak	21
G. Akuntansi Pajak Penghasilan	21
H. Penghasilan Bruto.....	29
I. Pengelompokan Penghasilan	31
J. Pengelompokan Harta Berwujud Dan Tarif Penyusutan.....	32
K. Pajak Penghasilan Final.....	38
L. Pajak Dalam Pandangan Islam	40
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Sejarah singkat perusahaan.....	42
B. Aktivitas Perusahaan	42
C. Struktur Organisasi Perusahaan.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

	A. Perhitungan Laba-Rugi	47
	B. Perhitungan Laba Menurut Undang-Undang Perpajakan .	49
	C. Penyajian di Laporan Keuangan	53
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	54
	B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan pajak terhadap pendapatan Negara sangat dominan pada saat sekarang ini, hal ini terjadi karena pajak merupakan sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada Negara dan merupakan cermin kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan pengeluaran Negara yang diatur oleh Perundang-undangan. Pengertian pajak itu sendiri pada dasarnya adalah iuran dari rakyat ke kas Negara dimana pemungutannya dapat dipaksakan karena didasarkan atas Undang-undang, tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) dan hasilnya digunakan untuk pembangunan di sektor sosial dan ekonomi. (Mardiasmo, 2003).

Salah satu yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Ini diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang penghasilan merupakan setiap tambahan ekonomis yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau penambahan kekayaan wajib pajak tersebut. Pengertian penghasilan dalam Undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi adanya tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah.

Pajak penghasilan merupakan pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan perusahaan yang diterima

dan diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan ini merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah secara periodik terhadap penghasilan yang diperoleh atau diterima perusahaan sebagai wajib pajak selama satu tahun pajak dan pajak penghasilan tersebut juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari rakyat dan administrasi pemungutannya diatur dalam Undang-undang. Perhitungan jumlah pajak penghasilan didasarkan pada laba menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, bukan pada laba yang dihitung berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Sejak Tahun 1983 dengan adanya UU No. 7 Tahun 1983 sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sistem *Self Assessment*, yaitu sistem pemungutan pajak dimana seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan mulai dari menentukan siapa yang menjadi wajib pajak, menghitung dan menetapkan besarnya terutang dan penyetoran yang dilakukan, dan mempertanggungjawabkan semua kewajiban itu dipercayakan kepada wajib pajak itu sendiri. Oleh karena itu fungsi fiskus terbatas pada melayani kebutuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaksanaannya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, untuk memudahkan pelaksanaan kewajiban perpajakan, terutama Wajib Pajak Badan diharuskan menyelenggarakan pembukuan yang sekurang-kurangnya terdiri dari pencatatan mengenai harta, utang, modal, penghasilan, biaya, penjualan, dan pembelian yang penyajiannya berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Selama ini perusahaan di Indonesia mengakui jumlah beban PPh pada laporan laba rugi komersial sesuai dengan jumlah PPh yang terutang menurut UU PPh, namun dengan diberlakukannya PSAK 46 secara efektif mulai dengan tanggal 1 Januari 2001, jumlah beban PPh yang harus diakui dilaporan laba rugi akuntansi terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan ditambah dengan satu unsur tambahan yaitu pajak penghasilan.

Menurut PSAK No 46, pajak kini merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Jumlah pajak kini sama dengan beban pajak yang dilaporkan dalam SPT. Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut Laporan Keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban. Kewajiban pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan sisa kompensasi kerugian. Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Dalam penerapan untuk menghitung pajak penghasilan terdapat perbedaan-perbedaan antara prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan Undang-undang Pajak Penghasilan. Secara garis besar perbedaan tersebut

menyangkut perbedaan perlakuan pada beberapa pos perkiraan tertentu, sehingga diperlukan koreksi fiskal terhadap laba yang disajikan pada laporan perhitungan laba rugi perusahaan yang disebut rekonsiliasi fiskal. Maka timbulah suatu pengertian laba fiskal dan laba komersial. Laba fiskal adalah laba yang dihitung berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang. Sedangkan laba komersial adalah laba yang tercantum dalam laporan keuangan yang perhitungannya berdasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Pada umumnya perbedaan tersebut timbul oleh adanya perbedaan pengakuan pendapatan antara prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, disamping itu juga terdapat perbedaan mengenai pembebanan biaya antara kedua prinsip tersebut. Karena peraturan pajak dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum berbeda, maka laba kena pajak dan laba keuangan sebelum pajak seringkali tidak sama sehingga menyebabkan jumlah pajak penghasilan yang diperhitungkan (menurut akuntansi) dengan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar (menurut SPT) terjadi perbedaan. Perbedaan tersebut dikelompokkan menjadi (1) perbedaan waktu (*Temporary Difference*) dan (2) perbedaan yang bersifat tetap (*Permanent Difference*).

Perbedaan waktu merupakan perbedaan dalam pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan ini mengakibatkan pergeseran pengakuan penghasilan dan biaya antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya, seperti : Penyusutan dan amortisasi.

Sedangkan perbedaan tetap merupakan perbedaan yang terjadi karena adanya perbedaan yang bersifat permanen dan tidak dikompensasi untuk masa yang akan datang, seperti biaya entertaint, sumbangan, pajak penghasilan, jamuan tamu, biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota yang tidak dapat diakui dalam perpajakan tetapi diakui dalam akuntansi.

Dalam perbedaan waktu, diperlukannya alokasi pajak antar periode, hal ini dilakukan karena perbedaan waktu muncul karena adanya perbedaan waktu pengakuan penghasilan dan beban pajak, perbedaan waktu ini akan pulih pada periode-periode berikutnya. Pada umumnya perbedaan waktu dalam jumlah bersih dan selisih netto nya dicatat sebagai debet atau kredit keperkiraan pajak penghasilan yang ditangguhkan. Untuk perbedaan tetap, harus dikeluarkan dari laba akuntansi karena tidak menambah masalah dalam alokasi pajak, maka tidak dibutuhkan alokasi pajak antar periode.

PT. Printis Pribadi Usaha Prima Pekanbaru merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan/distributor. Dalam kegiatan usahanya telah membuat laporan keuangan berdasarkan ketentuan akuntansi yakni berdasarkan pendapatan yang diperoleh dalam satu periode akuntansi atau satu tahun serta biaya-biaya yang dikeluarkan dalam satu tahun itu juga. Adapun permasalahan yang terjadi pada PT. Printis Pribadi Usaha Prima Pekanbaru ketentuan akuntansi yang berlaku umum dan Undang-Undang Perpajakan adalah sebagai berikut.

1. Perusahaan memasukan sumbangan sebesar Rp. 30.400.000 sebagai pengurang laba sebelum pajak. Dalam Undang-undang perpajakan No 36 Tahun 2008 pada pasal 9 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa harta yang

dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf m serta zakat yang diterima oleh amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disarankan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang bentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Dengan demikian, sumbangan tidak dapat diperlakukan sebagai pengurang Pendapatan Kena Pajak (PKP) karena sumbangan ini diberikan oleh perusahaan kepada pihak yang tidak mempunyai hubungan kerja.

2. Perusahaan juga memasukan pendapatan jasa giro (Pendapatan Bunga Bank) sebesar Rp. 62.494.907 sebagai penambah laba perusahaan. Padahal pendapatan jasa giro telah dikenakan pajak penghasilan final pasal 23 atas bunga yaitu bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang yang dibayarkan selain pada perbankan, dipotong PPh Pasal 23 dari jumlah bruto dengan tarif 15% ini diatur pada Pasal 4 ayat 2 (Djoko Muljono,2010:12), dimana pendapatan ini tidak akan dikenakan pajak lagi karena bank telah memungut pajak atas pendapatan tersebut, sehingga khusus pada Laporan Laba/Rugi Fiskal, Pendapatan jasa giro merupakan koreksi fiskal negative, artinya: Pendapatan Kena Pajak menjadi berkurang akibat adanya Pendapatan bunga jasa giro. Maka dari itu, pendapatan ini tidak dapat dimasukkan sebagai pendapatan bagi perusahaan.

3. Perusahaan juga memasukan asuransi tenaga kerja (astek) sebesar Rp 85.212.855 sebagai pengurang laba perusahaan. Dalam Undang-undang perpajakan No 36/2008 pada pasal 9 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan. Dengan demikian, biaya Astek tidak dapat dimasukan sebagai pengurang pendapatan kena pajak.
4. Biaya Entertainment sebesar Rp. 17.931.225. Berdasarkan Undang-undang perpajakan pada Pasal 9 ayat (1) huruf b yang berbunyi biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota tidak boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan. Biaya entertainment yang dikeluarkan perusahaan berupa biaya jamuan tamu perusahaan dan acara-acara yang dilakukan perusahaan.
5. Permasalahan selanjutnya dalam penerapan akuntansi pajak di dalam perusahaan ini adalah dalam menghitung penyusutannya perusahaan menggunakan metode garis lurus. Permasalahan dalam penyusutan ini adalah perusahaan mencatat umur ekonomis aktiva tetap 5 tahun dan 10 tahun sedangkan sesuai dengan peraturan perpajakan umur ekonomis aktiva tetap dikelompokkan menjadi kelompok I = 4 tahun, kelompok II = 8 tahun, kelompok III = 16 tahun, dan kelompok IV = 20 tahun.

Dengan adanya masalah tersebut, maka penulis tertarik mengadakan penelitian yang ruang lingkupnya adalah kelayakan akuntansi perpajakan yang

ditetapkan di PT. Printis Pribadi Usaha Prima Pekanbaru dengan judul: **“ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. PRINTIS PRIBADI USAHA PRIMA PEKANBARU”**

B. Perumusan Masalah

Setelah memperhatikan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang di hadapi perusahaan antara lain:

“Apakah Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Printis Pribadi Usaha Prima Pekanbaru telah sesuai dengan ketentuan perpajakan”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Printis Pribadi Usaha Prima Pekanbaru apakah telah sesuai dengan ketentuan perpajakan.

b. Manfaat Penelitian

1. Menambah wawasan penulis mengenai perhitungan laba atau rugi yang dihubungkan dengan undang-undang perpajakan
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam hal penerapan akuntansi pajak.
3. Sebagai bahan referensi bagi penulis yang ingin melakukan penelitian terhadap permasalahan yang sama.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lokasi obyek penelitian yaitupada PT Printis Pribadi Usaha Prima Pekanbaru beralamat di Jl. Tuanku Tambusai(Nangka) No. 38 Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi Pekanbaru.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada hari jum'at tanggal 8 September 2013 sampai dengan sekarang.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data pembukuan dan catatan-catatanakuntansi seperti perhitungan laba rugi, neraca, daftar penyusutan aktiva tetap, serta data yang berhubungan dengan perpajakan yaitu SPT Tahunan PPh Badan Tahunan 2011.

b. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini didapatkan pada bagian akuntansi bagian pelaporan pajak.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (interview)

Yaitu dengan melakukan Tanya jawab dengan bagian akuntansi/keuangan untuk memperoleh data keuangan yang diperlukan.

b. Dokumentasi

Adalah dengan mengumpulkan data-data perusahaan seperti laporan keuangan (Neraca, laporan laba rugi dan daftar aktiva tetap serta Surat Pemberitahuan Pajak)

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu dengan membandingkan antara ketentuan pajak yang berlaku umum dengan penerapan akuntansi perpajakan diperusahaan yang bersangkutan kemudiandari hasil perbandingan tersebut ditarik sesuatu kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Gambaran penulisan secara umum diuraikan secara ringkas dalam setiap bab dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang menguraikan teori-teori mengenai penelitian yang akan diteliti.
- BAB III : Dalam bab ini berisi gambaran umum perusahaan, aktivitas perusahaan, struktur organisasi perusahaan.
- BAB IV : Berisi uraian tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan yang terdiri dari analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan.
- BAB V : Berisi sekumpulan yang diperoleh dari pembahasan sebelumnya serta saran-saran kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil yang didapatkan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Pengertian Akuntansi

Peranan akuntansi sangat penting dalam kehidupan suatu organisasi. Karena akuntansi menghasilkan informasi yang digunakan manajer untuk menjalankan operasi perusahaan. Akuntansi memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kinerja ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi merupakan seni atau keterampilan mengolah transaksi atau kejadian yang setidak-tidaknya dapat diukur dengan laporan keuangan dengan cara yang sistematis berdasarkan prinsip yang berlaku umum sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mengetahui posisi keuangan serta hasil operasi perusahaannya pada setiap waktu yang diperlukan.

(Soemarso, 2004: 3) : memberi definisi akuntansi sebagai berikut:

Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Sedangkan menurut (Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati, 2012:2) memberikan definisi akuntansi sebagai berikut:

Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

B. Pengertian Pendapatan

Pendapatan menurut Niswonger et. Al (2007:56)

Pendapatan adalah kenaikan kotor (gross) dalam modal pemilik barang yang dihasilkan dari penjualan barang dagangan. Pelaksanaan jasa kepada pelanggan atau klien, penyewaan harta, peminjaman uang dan semua kegiatan usaha serta profesi yang bertujuan memperoleh penghasilan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang dimaksud merupakan penghasilan diperoleh dari segala jenis kegiatan usaha perusahaan yang akan meningkatkan nilai modal pemilik. Bastian, 2006:164)

Menjelaskan pengertian pendapatan sebagai berikut:

Pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lain atas harta dari satu kesatuan atau penyelesaian kewajibannya selama satu periode dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa atau aktivitas yang lain merupakan operasi pokok atau utama yang berkelanjutan dari satu kesatuan tersebut.

C. Pengertian Beban

Beban adalah pengorbanan ekonomi yang telah habis terpakai (expired) dan seluruhnya dibebankan dalam periode berjalan serta merupakan salah satu pengurang dari laba kotor, selain itu beban juga sebagai pengurang atas penggunaan aset dan pertambahan kewajiban akibat dari proses untuk memperoleh pendapatan. Menurut Kieso dan Waygand (2003:183):

Beban (*expenses*) adalah arus keluar atau penggunaan lain atas harta atau terjadinya kewajiban selama suatu priode dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau pelaksaannya aktivitas lain yang merupakan operasi pokok atau utama yang berkelanjutan dari kesatuan tersebut.

Sedangkan Ikatan Akuntansi Indonesia (2007: 19) memberikan definisi beban sebagai berikut:

Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi, beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau kas (dan setara kas), persediaan dan aktiva tetap.

D. Pengertian Pajak

Pengertian pajak secara umum adalah iuran kepada negara dari rakyat berdasarkan Undang-undang, dapat dipaksakan dan pemerintah tidak memberikan balas jasa secara langsung. Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2003:1) adalah:

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Sony Agustinus dan Istianto Kurniawan (2009 :1) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan Pajak Menurut M.J.H. Smeets dalam bukunya *De Economosche betekenis der belastingen* tahun 1951 yang dikutip oleh R. Santoso Brotodiharjo (2003:13) sebagai berikut:

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli, penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur yang mendasar antara lain :

1. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dipungut baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. Pajak dalam pembayarannya tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah atau tanpa jasa dari pemerintah secara langsung dapat ditunjukkan
3. Pajak merupakan dana membiayai pengeluaran pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat luas secara perkembangan dan pertumbuhan pembangunan nasional.

Dan menurut (Resmi, 2003 :13) ada dua fungsi pajak yaitu:

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*), yaitu fungsi pajak disektor publik, merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukan uang dari masyarakat berdasarkan undang-undang ke kas negara, hasilnya membiayai penghasilan umum.

- b. Fungsi mengatur (*regulated*), fungsi pajak yang digunakan untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan tertentu dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya pertahanan, dan keamanan misalnya dengan mengadakan perubahan pengembalian tarif yaitu dengan memberikan pengecualian atau keringanan-keringanan.

E. Pengertian Subjek Pajak dan Objek Pajak

1. Subjek Pajak

Subjek pajak diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang ditunjuk oleh undang-undang untuk dikenai pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pengertian subjek pajak menurut Waluyo (2011:33) adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap, lebih rincinya adalah sebagai berikut:

1. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi yang dimaksud merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.
3. Badan
Pengertian badan mengacu kepada Undang-Undang KUP, bahwa badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal merupakan kesatuan baik yang merupakan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Milik Daerah dengan nama dan bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau

organisasi lainnya, lembaga atau bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan tidak didirikan dan tidak bertempat berkedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk usaha tetap ini ditentukan sebagai subjek pajak tersendiri terpisah dari badan. Perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak tersendiri terpisah dari badan. Perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan dalam negeri. Pengenaan pajak penghasilan bentuk usaha tetap ini mempunyai eksistensi sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan.

2. Objek Pajak

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk mengenakan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek pajak untuk PPh adalah penghasilan. Pengertian penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama atau dalam bentuk apapun.

Sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 yang termasuk penghasilan sebagai objek pajak dengan nama dan bentuk apa pun adalah:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang pajak penghasilan.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghasilan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :

- a. Keuntungan karena penghasilan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekuritas, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau organisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro yang kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
 7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
 8. Royalti, atau imbalan atas penggunaan hak
 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
 14. Premi asuransi
 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
 16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak
 17. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah
 18. Imbalan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
 19. Surplus Bank Indonesia.

Atas penghasilan tertentu Undang-Undang Pajak Penghasilan memberikan pengecualian sebagai objek pajak, walaupun menurut Undang-

Undang Pajak Penghasilan suatu penerimaan atau pertambahan kemampuan ekonomis merupakan penghasilan. Beberapa pengecualian sebagai objek pajak ini bertujuan:

1. Untuk memberikan fasilitas perpajakan kepada wajib pajak tertentu tetapi tetap mengenakan pajak penghasilan atas penghasilan tersebut.
2. Untuk memberikan fasilitas perpajakan kepada wajib pajak tertentu demi kemajuan sosial ekonomi masyarakat tertentu.

Pasal 4 ayat (3) terdapat penghasilan yang tidak termasuk kategori penghasilan yang dikenakan PPh yaitu:

1. a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan atau keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah;
b. Harta Hiba yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, dan ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan
2. Warisan
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
4. Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau yang diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik

Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat :

- a. Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan;
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN, dan BUMD, yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor
7. Iuran yang diterima atau yang diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, baik yang di bayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
 8. Penghasilan yang diterima dari modal yang di tanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang di tetapkan dengan peraturan menteri keuangan.
 9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma daan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
 10. dihapus;
 11. penghasilan yang diterima atau yang diperoleh perusahaan model ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjelaskan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - a. Merupakan perusahaan mikro (kecil), menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektorusaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan;
 - b. Saham tidak diperdagangkan di bursa efek IndonesiaPerusahaan modal vantura adalah suatu perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai badan usaha (sebagaimana pasangan usaha) dalam bentuk pernyataan modal untuk suatu jangka tertentu.
 12. Beasiswa yang memenuhi persyaratannya tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan;
 13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dibidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar kepada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak di perolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 14. Bantuanatau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggaraan jaminansosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan/ atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.

F. Tarif Pajak

Tarif pajak penghasilan menurut Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagai berikut.

a. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50,000,000 (Lima puluh juta rupiah)	5% (Lima persen)
Diatas Rp 50,000,000 (Lima puluh juta rupiah) samapai dengan Rp 250,000,000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (Lima belas persen)
Diatas Rp 250,000,000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	25% (Dua puluh lima persen)
Diatas Rp 500,000,000 (Lima ratus juta rupiah)	30% (Tiga puluh persen)

b. Wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen).

G. Akuntansi Pajak Penghasilan

Menurut Supramono (2010:37) Pajak Penghasilan adalah setiap pertambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dipakai untuk komsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Bagi perusahaan, Penghasilan Kena Pajak merupakan jumlah yang material, sedangkan beberapa jumlah yang wajardan harus dicantumkan kedalam laporan laba rugi sebagai biaya pajak penghasilan adalah suatu masalah.

Suatu informasi utama yang diperlukan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan(SPT) pajak penghasilan adalah dari catatan akuntansi atau pembukuan yang benar dari perusahaan. Dalam perpajakan tidak mengatur bentukatau tatacara pembukuan yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Menurut Hartanto (2003:107) hal-hal yang lebih ditekankan dan diperhatikan dalam pembukuan atau pencatatan SPT adalah sebagai berikut:

1. Pembukuan harus diselenggarakan dengan berlandaskan pada itikad baik, dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
2. Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf lain, angka arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diijinkan oleh Menteri Keuangan.
3. Pembukuan harus diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan berdasarkan stelsel akrual atau stelsel kas.
4. Perubahan metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jendral Pajak.
5. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat ditentukan besarnya pajak yang terutang.
6. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah hanya dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.
7. Wajib Pajak yang menurut Pasal 28 (angka 2) dikecualikan dari kewajiban atau tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan harus menyelenggarakan pencatatan yang terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak, dan penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final.
8. Buku-buku, catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpanselama 10 tahun di Indonesia tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak Orang Pribadi, atau tempat kedudukan bagi Wajib Pajak Badan.

Cara perhitungan penghasilan kena pajak didalam Undang-undang pajak penghasilan mirip dengan cara menghitung laba netto yang dikenal di dalam akuntansi. Walaupun pola perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dalam pajak/fiskal mirip dengan pola perhitungan laba netto dalam akuntansi, itu tidak berarti bahwa seratus persen sama. Yang berbeda adalah:

1. Definisi penghasilan menurut Undang-undang Pajak Penghasilan berbeda dengan definisi pendapatan menurut akuntansi.
2. Di dalam Undang-undang Pajak Penghasilan dibedakan atas:
 - a. Penghasilan dikenakan pajak penghasilan bersifat tidak final.
 - b. Penghasilan dikenai pajak penghasilan bersifat final
 - c. Penghasilan yang bukan objek pajak.
3. Didalam Undang-undang pajak penghasilan biaya dibedakan atas:
 - a. Biaya yang boleh sebagai pengurang penghasilan (*deductible expenses/cost*)
 - b. Biaya yang tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan(*nondeductible exspenses/cost*)

Menurut Markus dan Yujana (2003:705-706) masih ada lagi beberapa perbedaan prinsip akuntansi dan prinsip Undang-undang pajak penghasilan.

Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Didalam Undang-undang Pajak Penghasilan saat pengakuan penghasilan dan biaya tidak selalu sama dengan saat pengakuan penghasilan dan biaya didalam akuntansi
- b. Didalam Undang-undang pajak penghasilan prinsip penghitungan untung rugi penjualan harta.
- c. Didalam Undang-undang pajak penghasilan pencatatan besarnya penghasilan dan biaya harus berdasarkan asas kebiasaan pedagang yang baik, yakni sesuai harga pasar yang wajar. Artinya, Undang-undang pajak penghasilan tidak mengizinkan jika ada wajib pajak yang melakukan

rekayasa pencatatan penghasilan dan biaya, misalnya dengan cara *mark up* atau *mark down* atau melakukan *transfer pricing* dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam rangka untuk memperkecil pajak penghasilan yang harus dibayar.

- d. Karena perbedaan-perbedaan tersebut, pengertian kerugian usaha antara Undang-undang pajak penghasilan dan akuntansi juga berbeda.

Perbedaan-perbedaan antara prinsip akuntansi dan prinsip pajak dalam laporan keuangan bisa dikelompokkan sebagai berikut:

1. Perbedaan Tetap (*Permanent Difference*)

Perbedaan tetap (*Permanent Difference*) menurut Purba dan Andreas (2005:8) adalah

Perbedaan disebabkan adanya perbedaan pengakuan beban dan pendapatan antara pelaporan komersial dan fiskal. Pendapatan dan beban tertentu diakui pada SPT namun tidak diakui pada laporan keuangan atau sebaliknya. Perbedaan ini mengakibatkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial.

Perbedaan ini timbul karena dalam undang-undang pajak penghasilan terdapat peraturan biaya yang tidak boleh sebagai pengurang penghasilan. Perbedaan ini bersifat tetap karena selisih laba akuntansi dengan penghasilan kena pajak tidak pernah dapat dikompensasikan pada masa yang akan datang.

Undang-Undang PPh No. 36 tahun 2008 menjelaskan penerimaan dan pengeluaran yang tidak mempengaruhi dan bukan merupakan objek pajak penghasilan badan seperti:

- 1) Pendapatan deviden, bunga, royalti, sewa, hadiah, penghargaan dan imbalan jasa tertentu yang sudah dikenakan pajak final

- 2) Penggantian imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang ditetapkan lain dalam perturan Menteri Keuangan
- 3) Jumlah imbalan yang melebihi kewajiban yang dibagikan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, seperti: pemberian gaji terlalu besar, pembayaran bunga atas pinjaman diatas bunga pasar dan sebagainya
- 4) Beban kontribusi sosial seperti sumbangan dan zakat
- 5) Sanksi perpajakan berupa denda dan bunga
- 6) Beban-beban yang berkaitan dengan jamuan dll.

Beda tetap tersebut diperhitungkan dalam menentukan perhitungan fiskal dan besarnya laba atau rugi fiskal.

2. Perbedaan Waktu (*Temporary Difference*)

Perbedaan waktu (*Temporary Difference*) menurut Purba dan Andreas (2005:9) adalah:

Perbedaan yang menyebabkan adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan ini mengakibatkan pergeseran pengakuan beban antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya.

Dalam hal ini baik menurut akuntansi maupun menurut pajak sama-sama mengakui bahwa suatu penerimaan merupakan penghasilan, atau suatu pengeluaran merupakan biaya yang boleh sebagai pengurang penghasilan.

Adapun perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut (Purba dan Andreas, 2005:9-10):

- a. Penyisihan piutang ragu-ragu, yang berdasarkan perpajakan akan diakui jika telah nyata-nyata tidak ditagih dan diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Berdasarkan pelaporan komersial, piutang usaha dapat disisihkan berdasarkan analisa umur piutang tersebut,
- b. Sewa guna usaha pembiayaan (*capital lease*), tidak boleh disusutkan oleh sipenyewa, sehingga angsuran pokok sewa guna usaha harus diakui sebagai biaya. Pelaporan komersial mengharuskan penyusutan bagi aktiva yang berasal sewa guna usaha pembiayaan (*capital lease*)
- c. Penilaian persediaan dapat berbeda antara pelaporan perpajakan dan komersial. Perpajakan hanya mengakui dua metode yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (FIFO), sementara dalam pelaporan komersial kita mengenal metode lain seperti masuk terakhir keluar pertama (FIFO), nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih dan lain-lain.
- d. Dalam perpajakan penyusutan aktiva tetap baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dikenal dengan dua metode penyusutan, yaitu metode garis lurus (*straight line methode*) dan metode saldo menurun (*decline balance methode*).

Berikut ini akan dikemukakan beberapa contoh yang mengakibatkan perbedaan waktu antara akuntansi komersial dengan akuntansi perpajakan:

a. Penyusutan

Menurut (IAI,2007:17) pengertian penyusutan yaitu alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang di estimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan kependapatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Metode penyusutan menurut Standar Akuntansi Keuangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Waktu

a. Metode Garis Lurus (*straight-line method*)

b. Metode pembebanan Menurun

2. Berdasarkan Penggunaan

a. Metode Jam Jasa (*service-hour method*)

b. Metode Jumlah Unit Produksi (*productive output method*)

3. Berdasarkan Kriteria Lainnya

a. Metode berdasarkan jenis dan kelompok (*group and composite method*)

b. Sistem persediaan (*inventory system*)

Metode penyusutan sesuai dengan Undang-undang perpajakan

1. Metode Garis Lurus (*straight-line method*)

2. Metode Saldo Menurun (*declining balance method*)

b. Amortisasi

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau bagian-bagian menurun selama manfaat yang dihitung dengan menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasikan sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Metode amortisasi yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*starigh line method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*). Wajib pajak diperkenankan untuk memilih salah satu metode untuk amortisasi.

Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat diamortisasi ditetapkan sebagai berikut :

Tabel II.2
Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi Harta Tak Berwujud

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Sumber : Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 11A

H. Penghasilan Bruto

Biaya-biaya yang diperkenankan bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha dalam rangka penghasilan kena pajak menurut UU No. 36 Tahun 2008 sebagai berikut :

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorium, bonus dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk utang, bunga sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak, kecuali pajak penghasilan.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dalam memelihara penghasilan.
- e. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya beasiswa, magang dan penelitian.
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat :

1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
2. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghasilan piutang/pembebasan utang antara kreditur dengan debitur yang bersangkutan.
3. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
4. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 dijelaskan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai berikut:

1. Pembagian laba dengan nama dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali
 - a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan pajak piutang.
 - b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang di bentuk oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
 - c. Cadangan penjamin untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
 - d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
 - e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk sebuah kehutanan.
 - f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengelolaan limbah industri.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa, yang dapat dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian dan imbalan dalam natura atau kenikmatan di daerah tertentu dan pemberian

natura dan kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf I sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh Badan Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
8. Pajak penghasilan.
9. Biaya yang dibebankan atau yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupadenda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan.

I. Pengelompokkan Penghasilan

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
3. Penghasilan dari modal yang berupa harta ataupun harta tak bergerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha dan lain sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah dan lain sebagainya. (UU No. 36 Tahun 2008)

J. Pengelompokan Harta Berwujud dan Tarif Penyusutan

Menurut Waluyo (2009:119) Penentuan kelompok tarif penyusutan Harta Berwujud didasarkan pada Pasal 11 Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 sebagai berikut:

Tabel II.3
Tarif Penyusutan Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode Garis Lurus	Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode Saldo Menurun
I. Buka bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12,50 %	25 %
Kelompok 3	16 tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5 %	10 %
Tidak Permanen	20 tahun	5 %	-
	10 tahun	10 %	-

Tabel II.4
Jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok I

Nomor Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin ketik, mesin hitung,

2.	<p>Pertanian, perkebunan, perhutanan, dan perikanan</p> <p>Industri makanan dan minuman.</p> <p>Perhubungan, pergudangan dan</p>	<p>duplikantor, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, <i>printer</i>, <i>scanner</i>, dan sejenisnya.</p> <p>c. Pelengkapam lainnya seperti <i>amplifier</i>, <i>tape/cassete</i>, <i>video recorder</i>, televisi, dan sejenisnya.</p> <p>d. Sepeda motor, sepeda, dan becak.</p> <p>e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan.</p> <p>f. Alat dapur untuk memasak, makanan, dan minuman.</p> <p>g. <i>Dies</i>, <i>jigs</i>, dan <i>Mould</i> Alat yang digerakan bukadengan mesin</p> <p>Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti <i>huller</i>, pemecah kulit, penyosoh, pengering, <i>pullet</i> dan sejenisnya.</p> <p>Mobil taksi, bus, dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.</p> <p><i>Fals memory tester</i>, <i>write machine</i>, <i>biporar test system</i>, <i>eliminatio (PE8-1) pose checker</i>.</p>
----	--	--

3.	komunikasi	
	Industri semi konduktor	
4.		

Tabel II.5
Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok 2

Nomor Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Semua jenis usaha	<p>a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya.</p> <p>b. Mobil, bus, truk, <i>speed boed</i>, dan sejenisnya.</p> <p>c. <i>Containner</i> dan sejenisnya</p>
2.	Pertanian, perkebunan,	<p>a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor atau mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih, dan sejenisnya.</p> <p>b. Mesin yang mengelola atau yang</p>

	kehutanan, perikanan.	<p>menghasilkan atau yang memproduksi bahan atau barang pertanian kehutanan, perkebunan, dan perikanan.</p> <p>a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan misalnya pabrik susu, pengalengan ikan.</p> <p>b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka.</p> <p>c. Mesin yang menghasilkan/ memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis.</p> <p>d. Mesin yang menghasilkan/ memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.</p> <p>Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan misalnya mesin jahit, pompa air.</p> <p>Mesin dan peralatan penebangan kayu.</p> <p>Peralatan yang dipergunakannya seperti truk berat, <i>dump</i>, <i>truk</i>, <i>crane</i>, <i>bulldozer</i>, dan sejenisnya.</p> <p>a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, dan truk</p>
3.	Industri makanan dan minuman	

		<p>pengangkat dan sejenisnya.</p> <p>b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus yang dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misal gandum, batu-batuan, biji tambang, dan sebagainya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya yang mempunyai berat samapai dengan 100 DWT.</p> <p>c. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang memuat berat sampai dengan 250 DWT.</p> <p>d. Kapal balon</p>
4.	Industri mesin	
5.	Perkayuan	
6.	Konstruksi	
7.	Perhubungan, pergudangan Dan komunikasi	<p>a. Perangkat pesawat telepon</p> <p>b. Pesawat telegraf, termasuk pesawat pengiriman, dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.</p> <p><i>Auto frame leader, automatic logic handler, baking over, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, cutting oven, cutting press, dombar cut machine, dicer, die bamder, die shear test, dynamic burn in system oven, dynamic test handler elimination (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser maker (fm A-01), logic test system, maker (makr), memory</i></p>

8.	Telekomunikasi	<i>test system, molding, mounter, MPS automatic, MPSS manual, o/s tester manual, pass oven, pose checker, reform machine, SMD stocker, taping machine, tubar cut press, trumming/forming machine, wire bander, wire pull tester.</i>
9.	Industri semi konduktor	

Tabel II.6
Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok 3

Nomor Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan
2.	Pemintalan, pertenunan, dan pencelupan	<p>a. Mesin yang mengolah/yang menghasilkan produk-produk tekstil, misalnya kain katun, sutra serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena, rami, permadani, kain-kain bulu, tule.</p> <p>b. Mesin untuk <i>preparation</i>,</p>

		<p><i>bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging, dan sejenisnya.</i></p> <p>a. Mesin yang mengolah/ yang menghasilkan produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput, dan bahan anyaman lainnya.</p> <p>b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.</p>
3.	Perkayuan	
4.	Industri Kimia	<p>a. Mesin dan peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia, misalnya bahan kimia organik dan organik dari logam mulia, elemen radioaktif, isotop, bahan kimia organik,, <i>arasinoida</i> wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, deterjen, dan bahan organik pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan pelek, produk proteknik, korek api. <i>Alloy perforis</i>, barang fotografis dan sinematografis</p> <p>Mesin yang menghasilkan memproduksi mesin menengah dan berat, misalnya mesin mobil, mesin kapal</p> <p>a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk penangkutan barang-barang tertentu (misalnya</p>

6.		
7.	Telekomunikasi	

Tabel II.7
Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok 4

Nomor Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi
2.	Perhubungan dan Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokomotif uap dan tender atas rel b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan baterai atau dengan tenaga listrik dari sumber luar. c. Lokomotif atas rel lainnya. d. Karet, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan dilengkapi

		<p>untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan.</p> <p>e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin dan kapal tengki, kapal penangkap ikan dan sebagainya yang mempunyai berat diatas 1.000 DWT.</p> <p>f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal siar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya yang mempunyai berat diatas 1.000 DWT</p> <p>g. Dok-dok terapung.</p>
--	--	--

K.Pajak Penghasilan Final

Menurut Waluyo (2012:272) pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan atas penghasilan tertentu yang dikenakan pajak tersendiri yang bersifat final.

Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2007:46.15) Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu.

Contohnya adalah pajak penghasilan atas pengalihan hak tanah dan bangunan, bunga deposito dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI), pajak penghasilan

atas penghasilan hadiah, pajak penghasilan atas penghasilan persewaan tanah dan bangunan.

Sehubungan dengan adanya objek PPh final, terdapat perlakuan pajak atas biaya-biaya yang berhubungan dengan penghasilan yang menjadi objek PPh final. Berdasarkan pasal 4 huruf b PP No. 138 tahun 2000 tanggal 21 Desember tentang perhitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 UU PPh, menurut Resmi (2009:145-146) pajak penghasilan yang bersifat final terdiri atas:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
2. Penghasilan berupa Hadiah Undian
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estat* dan persewaan tanah dan atau bangunan;

5. Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lainnya).

Pajak penghasilan bersifat final selain disebut diatas adalah:

1. PPh final Pasal 17 ayat (2) c UU PPh atas deviden yang di terima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. PPh final Pasal 15, terdiri atas:
 - a. PPh atas jasa pelayanan dalam negeri
 - b. PPh atas pelayanan dan atau penerbangan luar negeri
 - c. PPh atas penghasilan perwakilan dagang luar negeri
 - d. PPh atas pola bagi hasil;
 - e. PPh atas kerja sama bentuk BOT;
3. PPh final Pasal 19 yaitu PPh atas evaluasi aset tetap

L. Pajak Dalam Pandangan Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah *Dharibah* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, menerangkan atau membebaskan dan lain-lainnya. Sedangkan secara bahasa atau tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *Jizyah* dan *Kharaji* dipungut secara *dharibah* yaitu secara wajib.

Adapun pajak dalam islam dapat kita lihat didalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 29 :

5. Diberlakukannya untuk kondisi darurat (khusus), yang segera harus diatasi oleh Uliil Amri.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

PT Printis Pribadi Usaha Prima Pekanbaru adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang distributor/perdagangan yang beralamat di jalan Nangka No 38 Pekanbaru. Semula PT. Printis Pribadi Usaha Prima Pekanbaru adalah toko kegiatan yang dilakukan pun tidak jauh berbeda dengan toko-toko yang menjual barang harian yaitu sabun, sampo, deterjen, dan rokok dan lain-lainnya yang beralamat di jalan H. Agus Salim Pekanbaru yang berdiri pada tahun 1971. Dan Pada tahun 1980 sampai tahun 1992 pindah ke jalan Sudirman tetapi masih berupa toko. Karena usahanya mengalami perkembangan yang cukup pesat maka pada tahun 1999 resmi menjadi PT dan diberi nama PT. Printis Pribadi Usaha Prima yang beralamat di jalan Nangka sampai dengan sekarang.

PT. Printis Pribadi Usaha Prima Pekanbaru ini didirikan oleh ibu Enny Indrawatie yang sekaligus menjadi komisaris utama perusahaan ini. Sedangkan sebagai Direktur Utama adalah Ibu Renawatie Setiawan yang merupakan anak kandung dari ibu Enny Indrawatie dan Bapak Setiawan.

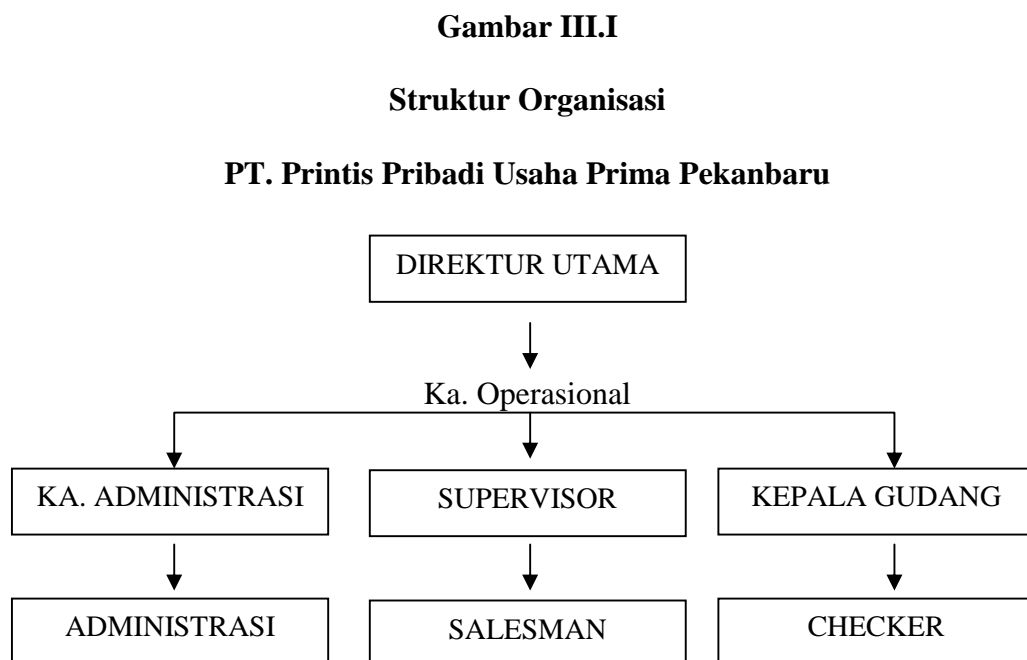
B. Aktivitas Perusahaan

Aktivitas perusahaan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan distributor. Adapun kegiatan yang terjadi dalam dan diluar perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kelancaran jalannya perusahaan.

C. Struktur Organisasi Perusahaan

Organisasi adalah suatu badan yang didalamnya ada orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, maka masing-masing orang dapat mengetahui tugas dan tanggungjawab serta kepada siapa bertanggungjawab. Dimana struktur organisasi tersebut menggambarkan hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian, posisi maupun kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda pada masing-masing anggota organisasi.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis laksanakan pada perusahaan PT. Printis Pribadi Usaha Prima Pekanbaru, maka diketahui bahwa perusahaan tersebut menggunakan bentuk struktur organisasi garis. Untuk lebih jelasnya secara keseluruhan PT. Printis Pribadi Usaha Prima Pekanbaru telah menggariskan pembagian kerja atau tugas yang terdapat pada gambar sebagai berikut:



Sumber: PT. Printis Pribadi Usaha Prima Pekanbaru.

Dalam struktur organisasi PT. Printis Pribadi Usaha Prima Pekanbaru diperlihatkan bahwa setiap bagian memiliki tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang berbeda-beda, berikut ini dijelaskan secara terperinci tentang bagian-bagian beserta tugas yang ada dalam perusahaan ini.

a. Direktur Utama

Direktur Utama mempunyai tanggungjawab penuh terhadap Segala aktivitas perusahaan dan dalam mengambil keputusan.

Adapun tugas wewenang dan tanggungjawab Direktur Utama adalah:

- a. Menentukan kebijaksanaan secara umum menyangkut tentang pengambilan keputusan perusahaan.
- b. Mengawasi dan mengontrol jalannya perusahaan
- c. Membuat rencana-rencana perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

b. Kepala Administrasi

Merupakan Wakil dari direktur utama yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Menganalisis dan mengontrol hasil penjualan
- b. Bertanggungjawab kepada direktur utama
- c. Menyusun dan membuat target penjualan dalam perusahaan.
- d. Memberikan informasi mengenai kebijakan perusahaan kepada karyawan.

b. Administrasi

Mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Membuat pelunasan piutang perusahaan
- b.
- c. Mencetak faktur yang diorder atau pesan oleh perusahaan
- d. Menangani semua urusan pajak seperti pembayaran pajak dan pengisian SPT PPh.
- e. print stock setiap hari agar dapat disesuaikan dengan stock yang ada digudang
- f. Membuat laporan-laporan faktur yang telah ditagih maupun yang belum ditagih oleh salesmen.

c. Kepala Gudang

Mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melapor masukan barang kepada pimpinan perusahaan
- b. Mengawasi pengiriman barang keperusahaan lain
- c. Mengatur tugas-tugas bawahan yang ada dibagian gudang

d. Supervisor

Mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap karyawan
- b. Memberikan supervise/bimbingan terhadap karyawan
- c. Mengadakan pengembangan terhadap perusahaan
- e. Salesmen

- a. Memberikan informasi atas keadaan pasar serta yang menyangkut penjualan kepada bagian penjual.
 - b. Membuat faktur penjualan perusahaan
 - c. Mencatat pesanan barang yang dibutuhkan oleh setiap pelanggan
 - d. Melakukan penagihan dari barang yang telah dijual kepada pelanggan.
- f. Checker (Pemeriksaan)

Mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Memeriksa pemasukan barang yang ada dibagian gudang
- b. Mencatat harga-harga barang yang masuk
- c. Melaporkan barang-barang yang sudah diperiksa ke kepala gudang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perhitungan Laba Rugi

Pada setiap akhir periode akuntansi perusahaan dituntut untuk membuat laporan keuangan, termasuk perhitungan laba rugi. Laporan perhitungan laba rugi mengikhtisarkan pendapatan yang diperoleh dan beban yang diperhitungkan selama waktu tertentu. Laporan perhitungan laba rugi yang disajikan oleh perusahaan tersebut haruslah berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan. Dari perhitungan laba rugi PT. Printis Pribadi Usaha Prima Pekanbaru dalam lampiran II, tertera laba setelah usaha sejumlah RP. 321.839.269 laba bersih sebelum pajak Rp. 384.334.176.

1. Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh perusahaan selama satu periode akuntansi. Selama tahun 2011 PT. Printis Pribadi Usaha Prima Pekanbaru melaporkan pendapatan usaha sebesar RP. 96.183.988.789. Pendapatan ini diperoleh perusahaan dari penjualan barang dagang.

2. Harga Pokok Penjualan

Harga Pokok Penjualan merupakan biaya yang berkaitan langsung dengan aktivitas penjualan barang dagang dan jasa service. Biaya-biaya tersebut sebagaimana lazimnya perusahaan dagang. Unsur-unsur dari harga pokok penjualan yang disajikan dalam laporan laba rugi PT. Printis Pribadi Usaha Prima Pekanbaru periode Januari-Desember 2011 dapat dilihat dalam

lampiran II. Dari laporan tersebut dapat diketahui harga pokok penjualan adalah sebesar Rp. 92.035.962.666

3. Beban

Beban yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan selain harga pokok penjualan, adalah biaya operasional. Biaya operasional yang disajikan dalam laporan Laba Rugi PT. Printis Pribadi Usaha Prima Pekanbaru periode Januari-Desember 2011 adalah sebesar Rp. 3.826.186.854. Beban ini telah disajikan dalam Laporan Laba Rugi perusahaan.

4. Pendapatan di Luar Usaha

Selain unsur-unsur laporan laba rugi diatas, PT. Printis Pribadi Usaha Prima Pekanbaru juga menyajikan pendapatan dari luar usaha. Pendapatan tersebut adalah Pendapatan Jasa Giro sebesar Rp. 62.494.907.

Laba usaha sebelum pajak yang diperoleh PT. Printis Pribadi Usaha Prima Pekanbaru sebesar Rp. 384.334.176 maka perhitungan menurut perusahaan (komersial) atas pajak penghasilan (PPh) badan yang terutang untuk tahun yang berjalan adalah sebagai berikut:

Laba Usaha Sebelum Pajak **Rp. 384.334.176**

PPh Terutang :

$$25 \% \times \text{Rp. } 384.334.176 = \text{Rp. } 96.083.544$$

Dari perhitungan diatas maka dapat diketahui besarnya pajak terutang menurut perhitungan laporan komersial adalah sebesar Rp. 96.083.544

B. Perhitungan Laba Menurut Undang-Undang Perpajakan

Pada Bab II telah disebutkan bahwa perhitungan laba yang disusun oleh perusahaan yang berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku tidaklah selalu sama dengan perhitungan laba menurut Undang-undang perpajakan. Perhitungan laba berdasarkan akuntansi disebut laba akuntansi (laba komersial), sedangkan perhitungan laba menurut perpajakan disebut laba fiskal.

Agar laporan keuangan yang disusun perusahaan dapat digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang sesuai dengan peraturan perpajakan, maka diperlukan adanya koreksi atas beberapa item laporan keuangan yang disebut rekonsiliasi fiskal. Koreksi ini diperlukan karena terdapat perbedaan antara prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan Undang-undang perpajakan.

Tabel IV.1
Rekonsiliasi Fiskal

Uraian	Peraturan/ Ketetapan	Menurut Akuntansi/ Komersial (Rp)	Koreksi Fiskal(Rp)	Menurut Fiskal (Rp)
Pendapatan Pokok Usaha				
PENDAPATAN USAHA		96.183.988.789	0	96.183.988.789
HARGA POKOK PENJUALAN (HPP)		(92.035.962.666)		(92.035.962.666)
LABA KOTOR		4.148.026.123		4.148.026.123
<u>BIAYA USAHA OPERASIONAL</u>				
Biaya Gaji dan THR		597.800.000	-	597.800.000
Astek	UU No. 36 Tahun2008	85.212.855	(a)85.212.855	-
Ongkos Bongkar		167.873.750	-	167.873.750
Biaya Administrasi Kantor		255.236.941	-	255.236.941
Biaya Kendaraan		1.392.966.785	-	1.392.966.785
Biaya Perjalanan Dinas		123.463.311	-	123.463.311
Biaya Listrik & Air		68.591.204	-	68.591.204
Biaya Telepon		80.934.758	-	80.934.758
Biaya Sewa		157.000.000	-	157.000.000
Biaya Pemeliharaan Aktiva		17.065.000	-	17.065.000
Biaya Adm Bank		16.162.000	-	16.162.000
PBB		8.201.311	-	8.201.311
Biaya Sumbangan	UU No. 36 Tahun2008	30.400.000	(b)30.400.000	-
Biaya Penyusutan Aktiva		369.465.000	(c)(82.141.250)	287.323.750
Biaya Keamanan		9.332.500	-	9.332.500
Biya Promosi		50.000	-	50.000
Biaya BBM		99.312.450	-	99.312.450
Biaya Perlengkapan Kantor		99.110.960	-	99.110.960
Biaya Entertainment	UU No. 36 Tahun2008	17.931.225	(d)17.931.225	-
Biaya servis & reparasi kendaraan		230.076.804		230.076.804
JUMLAH BIAYA OPERASIONAL		3.826.186.854		3.610.501.524
LABA SETELAH USAHA		321.839.269		547.524.599
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN				
Pendapatan Jasa Giro	UU No. 36 Tahun 2008	62.494.907	(e)(62.494.907)	-
Laba Bersih	-	384.334.176	153.190.423	547.524.599
Pajak Penghasilan		(96.083.544)		(134.381.150)
Laba Bersih Setelah Pajak		288.250.632		401.143.449

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan hasil koreksi fiskal diatas, terjadi kenaikan laba sebelum pajak dari Rp 384.334.176.- menjadi Rp 537.524.599.- sehingga terjadi kenaikan pada pajak penghasilan badan yang harus dibayar dari Rp 96.083.544.- menjadi Rp 134.381.150.-. Dengan demikian, perhitungan pajak penghasilan badan setelah koreksi adalah sebagai berikut:

Penghasilan kena pajak Rp 537.524.599.-

Pajak yang terutang:

$Rp\ 537.524.599 \times 25\% = Rp\ 134.381.150.-$

Untuk melihat perbedaan yang ada, maka penulis akan mencoba menguraikan adanya item-item dalam laporan perhitungan laba rugi perusahaan yang tidak dapat dimasukkan dalam laporan perhitungan laba rugi fiskal sehingga harus dikoreksi fiskal beda tetap dan beda sementara, yaitu:

- a. Perusahaan memasukan asuransi tenaga kerja (Astek) sebesar Rp 85.212.855.- sebagai pengurang laba perusahaan. Dalam Undang-undang perpajakan No 36/2008 pada pasal 9 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan. Dengan demikian, biaya Astek tidak dapat dimasukan sebagai pengurang pendapatan kena pajak.
- b. Perusahaan memasukan sumbangan sebesar Rp. 30.400.000.- sebagai pengurang laba sebelum pajak. Dalam Undang-undang perpajakan No. 36

Tahun 2008 pada pasal 9 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf m serta zakat yang diterima oleh amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disarankan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang bentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Dengan demikian, sumbangan tidak dapat diperlakukan sebagai pengurang Pendapatan Kena Pajak (PKP) karena sumbangan ini diberikan oleh perusahaan kepada pihak yang tidak mempunyai hubungan kerja.

- c. Biaya Entertainment sebesar Rp. 17.931.225.- Berdasarkan Undang-undang Perpajakan pada Pasal 9 ayat (1) huruf b yaitu biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota tidak boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan. Biaya entertainment yang dikeluarkan perusahaan berupa biaya jamuan tamu perusahaan dan acara-acara yang dilakukan perusahaan.
- d. Perusahaan juga memasukan pendapatan jasa giro (Pendapatan Bunga Bank) sebesar Rp. 62.494.907 sebagai penambah laba perusahaan. Padahal pendapatan jasa giro telah dikenakan pajak penghasilan final pasal 23 atas bunga yaitu bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang yang dibayarkan selain pada perbankan,

dipotong PPh Pasal 23 dari jumlah bruto dengan tarif 15% ini diatur pada Pasal 4 ayat 2 (Djoko Muljono,2010:12), dimana pendapatan ini tidak akan dikenakan pajak lagi karena bank telah memungut pajak atas pendapatan tersebut, sehingga khusus pada Laporan Laba/Rugi Fiskal, Pendapatan jasa giro merupakan koreksi fiskal negative, artinya: Pendapatan Kena Pajak menjadi berkurang akibat adanya Pendapatan bunga jasa giro. Maka dari itu, pendapatan ini tidak dapat dimasukkan sebagai pendapatan bagi perusahaan.

- e. Dalam menghitung penyusutan (beda sementara) aset tetap perusahaan menggunakan metode garis lurus. Dengan penaksiran sebagai berikut: Kendaraan Umur Ekonomis 10 tahun Rp 318.320.000.- dan Inventaris Kantor Umur Ekonomis 5 tahun Rp 31.145.000.-. Sedangkan menurut Undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: Kendaraan 8 tahun (12,5%) dan Inventaris Kantor 4 tahun (25%).

Tabel IV. 2
Perbandingan Penyusutan Komersial dengan Fiskal

Jenis Aktiva		Penyusutan Komersial	Penyusutan Fiskal	Selisih
1.	Inventaris Kantor	Rp31.145.000	Rp38.706.250	(Rp 7.561.250)
2.	Kendaraan	Rp318.320.000	Rp397.900.000	(Rp 79.580.000)
3.	Gedung	Rp 20.000.000	Rp15.000.000	Rp5.000.000
Jumlah		Rp 369.465.000	Rp 451.606.250	(Rp 82.141.250)

Sumber : Data Hasil Olahan

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa perbandingan penyusutan komersial dengan fiskal menimbulkan Koreksi Fiskal (Negatif) sebesar 82.141.250.

C. Penyajian di Laporan Keuangan

Adapun penyajian di Laporan Keuangan telah sesuai dengan ketentuan akuntansi yaitu sebesar Laba (Rugi) bersih sebelum pajak sebesar Rp 384.334.176.-. Setelah dilakukan koreksi fiskal maka terdapat kenaikan antara laba komersial (akuntansi) dengan laba fiskal (pajak) dari Rp. 384.334.176.- menjadi Rp 537.524.599.- rincian sebagai berikut :

Laba usaha sebelum pajak	Rp. 537.524.599.-
--------------------------	-------------------

PPh Pasal 29 Terutang	<u>Rp. (134.381.150).-</u>
-----------------------	----------------------------

Laba usaha Setelah Pajak (Koreksi)	Rp. 401.134.449
------------------------------------	-----------------

Karena pajak penghasilan perusahaan sebelumnya belum pernah diangsur (PPh Pasal 25) Maka beban pajak penghasilan perusahaan merupakan PPh Pasal 29 terutang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian lalu menganalisa dan mengevaluasi terhadap permasalahan yang penulis temukan dilapangan, maka penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu:Perusahaan menghitung pajak penghasilan dengan berpedoman dengan laporan keuangan komersial dan penerapan perhitungan pajak penghasilannya belum sesuai dengan ketentuan perpajakan. Adapun pajak yang tidak diakui menurut ketentuan perpajakan adalah sebagai berikut: biaya sumbangan, biaya entertainment, biaya astek, pendapatan jasa giro dan beban penyusutan. Karena tarif penyusutan perusahaan berbeda dengan tarif penyusutan perpajakan, kemudian perusahaan tidak melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25, sehingga beban pajak penghasilan merupakan PPh Pasal 29 terutang.

B. Saran-Saran

Selain kesimpulan yang penulis kemukakan, penulis juga memberikan saran-saran yaitu perusahaan harus mencatat akuntansi perpajakan berdasarkan PSAK No 46 dan perhitungan pajak penghasilandiseuaikan dengan ketentuan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alquran Surat Attaubah Ayat 29.
- Agoes, Sukrisno dan Trisnawati, Estralita. 2012. *Akuntansi Pajak*. Edisi 2. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Agustinus, Sony dan Kurniawan, Istianto. 2009. *Pepajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Informasi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Pajak. *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- Hartanto. 2003. *Akuntansi Pepajakan*. BPFE-YOGYAKARTA. Yogyakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Kieso, Donald E. And Jerry J. Weygandt. 2003. *Akuntansi Intermediate*. Terjemahan Hendra Wibowo. Bina Rupa Aksara. Jakarta
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Markus, Muda dan Hendry, Yujana. 2003. *Petunjuk Umum Permasalahan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan Undang-undang terbaru*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pusaka Utama.
- Muljono, Djoko. 2010. *Pemotongan Pemungutan PPh dan PPh Pasal 25/29*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta
- Niswonger, C. Rollin, Philip E. Fress, and Carl S. Warren. 2007. *Prinsip-prinsip Akuntansi*. Edisi Keenam Belas. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Purba, Marisi P., dan Andreas. 2005. *akuntansi Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Penerbitan Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 5. Buku 1. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- R.Santoso Brotodiharjo. 2003. *Pengaturan Hukum Pajak*. Bandung: Penerbit PT Erasco.
- Supramono. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Waluyo 2009. Akuntansi Pajak. Edisi 2: Penerbit Salemba Empat. Jakarta

_____. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Buku 1. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

._____. 2012. *Akuntansi Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Penerbit Salemba Empat